

1. Peralihan hak milik atas tanah menurut UUPA.

Pendaftaran tanah yang bersifat rechts kadaster bertujuan untuk menjamin tertib hukum dan kepastian atas hak tanah. Dalam rangka pelaksanaannya tugas pendaftaran tanah dilakukan berbagai kegiatan antara lain : pelaksanaan pembukuan, pendaftaran dan pemindahan hak atas tanah. Di dalam pemindahan hak atas tanah oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa penyelenggaraannya dilakukan oleh pejabat khusus yaitu "Pejabat Pembuat Akte Tanah." Pejabat ini diangkat oleh Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria setelah melalui ujian dan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Disamping Pejabat tersebut, maka untuk melaksanakan tugas yang sama para Camat/Kepala Wilayah Kecamatan, karena jabatannya berfungsi pula sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah.

Hak atas tanah mempunyai peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960 Lembaran Negara 1960 No. 104 telah menentukan bahwa tanah-tanah diseluruh Indonesia harus diinventarisasikan. Pasal 19 ayat 1 UUPA No. 5 / 1960 berbunyi : "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran

tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.* Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah P.P No. 10 tahun 1961 (L.N. 1961 No.28 tentang Pendaftaran Tanah).

Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria berlaku terdapat adanya dualisme dalam hukum, karena ada hak yang berstatus hak Barat, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) seperti Eigendom, Erfpacht, dan sebagainya. Peralihan haknya dilakukan dihadapan Notaris. Sedang hak-hak yang diatur dengan Hukum Adat (hak-hak adat), seperti tanah yayasan dilakukan oleh Kepala Desa. Dengan UUPA ini maka dualisme dalam hukum dihapus, dengan "Dasar kesatuan Hukum : Anti Dualisme", karena oleh pembuat U.U.P.A banyak dijelaskan bahwa sifat dualisme itu adalah akibat dari politik hukum pemerintah jajahan. (Prof. Dr. Sudargo Gautama, 1973 : 10)

Dengan berlakunya UUPA, maka dualisme dalam pertanahan dihilangkan. Semua peralihan atas hak tanah diperlakukan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah. Peralihan-peralihan hak yang harus dilakukan dihadapan seorang Pejabat Pembuat Akte Tanah ialah :

a. Jual-beli,

antara kadua belah pihak penyelenggara aqad dan harus jauh dari penganiayaannya. (Ahmad Muhammad Al-Assol dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 : 190)

Aqad-aqad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan dari penganiayaan. Sebab pada asalnya harta seorang muslim lain itu tidak halal kecuali jika dipindahkan haknya dengan kesukaan hatinya. Akan tetapi hatinya itu tidak akan suka, kecuali apabila ia berikan miliknya itu dengan kerelaan bukan terpaksa, dengan ketulusan bukan karena tertipu atau terkecoh.

- d. Semua aqad (kontrak) dan muamalat harus dapat merealisasikan tujuan-tujuan syariat dalam ibadat dan akhlak. (Ahmad Muhammad Al-Assol dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 : 191)

Semua aqad dan muamalat membawakan tujuan syari'at dengan mewujudkan maslahat-maslahat manusia dalam dunia usaha dan tukar menukar manfaat, dan memudahkan sarana kehidupan dengan syarat tidak terlepas dari usaha mensucikan kehidupan manusia, dengan mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah dan menegakkan prinsip-prinsipnya, memelihara akhlak dan budi pekerti yang mulia, dan tidak merusak hubungan persaudaraan atau

meruntuhkan salah satu nilai dari nilai-nilai Islam yang mulia. Tetapi apabila aqad-aqad dan muamalat-muamalat itu telah berbuat lain dan hendak menuju kepada pelanggaran batas-batas budi pekerti ini, maka sebenarnya aqad-aqad dan muamalat-muamalat itu telah dikuasai Setan dan termasuk perangkap-perangkap cara-cara usaha yang rendah. (Ahmad Muhammad Al-Assol dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 : 192)

- e. Semua aqad muamalat tidak bisa sempurna kecuali dengan menempatkan ukuran dan pembatasan harga.

Semua muamalat tidak sah kecuali jika barang yang diadakan itu ukurannya terbatas dan harganya pun dimaklumi, agar orang terhindar dari penipuan dan pertengkaran, dan agar lapanglah pergaulan manusia, maka akan sehat pula kehidupan dan budi pekerti mereka, dan mudahlah lalu pertukaran manfaat antar mereka. Kita dilarang jual beli garar (Spikulasi), karena dalam pada itu tidak diketahui harga ataupun barang yang dihargakan. Juga dilarang menjual belikan janin yang masih dalam perut induknya, atau ikan yang masih dalam air, dilarang pula berjual beli makanan kecuali bila kedua takaran, penjual dan takaran pembeli bersesuaian. (Ahmad Muhammad Al-Assol dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980 : 197)

- 2). Hibah menurut syara' ialah aqad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut i'arah (pinjaman).
(Sayid Sabiq, 1988 : 167)

Apabila hak pemilikan itu belum terselenggara di waktu pemberinya hidup, akan tetapi diberikan sesudah dia mati maka itu adalah wasiat. Apabila pemberian itu disertai dengan imbalan maka itu adalah penjualan, dan padanya berlaku hukum jual-beli. Yakni bahwa hibah itu dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya aqad, sesudah itu tidak dilaksanakan tasarruf penghibah kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah.

Didalam hibah itu bisa juga terjadi khiyar dan suf'ah. Dan disyaratkan agar imbalan itu diketahui. Bila tidak maka hibah itu batal.

Hibah mutlak tidak menghendaki imbalan, bagi yang semisal, atau lebih rendah, atau yang lebih tinggi darinya.

Inilah hibah dengan maknanya yang khusus. Ada-

pun hibah dengan maknanya yang umum, maka ia meliputi hal-hal berikut :

- a). Ibra : yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
- b). Sadaqah : yaitu menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
- c). Hadiah : yaitu yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan. (Sayid Sabiq, 1988 : 168)

Adapun mengenai Rukun Hibah itu dianggap sah apabila melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab dan qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan, misalnya penghibah berkata, Aku hibahkan kepadamu, Aku berikan kepadamu, atau yang serupa itu, sedang yang lain berkata, Ya, Aku terima. Malik dan As-Syafi'i berpendapat, dipegangnya qabul didalam hibah. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab sudah cukup, dan itulah yang paling soheh. Sedang orang-orang Hambali berpendapat, bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya, karena Nabi Saw. diberi dan memberikan hadiah, begitu pula dilakukan oleh para Sahabat serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu. (Sayid Sabiq 1988 : 170)

Sedangkan syarat hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah dan sesuatu yang dihibahkan. Secara rinci disyaratkan bagi penghibah itu sebagai berikut :

- (1). Penghibah memiliki apa yang dihibahkan.
- (2). Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya.
- (3). Penghibah itu orang dewasa.
- (4). Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu aqad yang disyaratkan keridaan dalam keabsahannya.

Disyaratkan bagi orang diberi hibah itu ialah benar-benar ada diwaktu hibah. Bila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk jamin, maka hibah itu tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada diwaktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

Mengenai barang yang dihibahkan itu disyaratkan sebagai berikut :

- (1). Benar-benar ada.
- (2). Harta yang bernilai.
- (3). Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang di-

Apabila wasiat itu tidak tertentu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan qabul, akan tetapi cukup dengan ijab saja, sebab dalam keadaan demikian wasiat itu menjadi sadaqah. Apabila wasiat itu ditentukan kepada orang tertentu, maka ia memerlukan qabul dari orang yang diberi wasiat setelah pemberi wasiat mati, atau qabul dari walinya apabila orang yang diberi wasiat belum mempunyai kecerdasan. Apabila wasiat diterima, maka terjadilah wasiat itu. Bila wasiat ditolak setelah pemberi wasiat mati, maka batallah wasiat dan ia tetap menjadi milik dari ahli waris pemberi wasiat.

Wasiat itu termasuk kedalam perjanjian yang diperbolehkan, yang didalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya, atau menarik kembali apa yang dia kehendaki dari wasiatnya, atau menarik kembali apa yang akan diwasiatkan.

Penarikan kembali itu harus dinyatakan dengan ucapan. Dan boleh juga penarikan kembali wasiat itu dengan tindakan, misalnya tindakan orang yang mewasiatkan terhadap apa yang diwasiatkan dengan tindakan menjual barang yang diwasiatkan itu. (Sayid Sabiq, 1988:225)

Wasiat itu menghendaki syarat-syarat sebagai

